**OPTIMALISASI PERCEPATAN PENSERTIFIKATAN TANAH ASET DAERAH DALAM MERAIH OPINI LAPORAN KEUANGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH**

Miftakhul Jannah

NPP. 29.0815

*Asdaf Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah*

*Program Studi Keuangan Publik*

Email: miftakhuljannah879@gmail.com

***ABSTRACT***

***Problem Statement/Background (GAP):*** *The Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Pati Regency carries out legal safeguards for land fixed assets in the form of land certificates for regional assets in the context of BMD management. The problem of this research is that the recording in the inventory book is not in accordance with what is in the field and there are still cases of land fixed assets with third parties. This can be seen from the data on land assets in the Pati Regency area, there are still many that have not been certified.* ***Purpose:*** *This study aims to describe how the author raised the title Optimizing the Acceleration of Regional Asset Land Certification in Obtaining Financial Statement Opinions during the Covid-19 Pandemic at the Regional Financial and Asset Management Agency, Pati Regency, Central Java Province.* ***Method:*** *This study uses qualitative descriptive. The data collection techniques were carried out by interview techniques, observation techniques, and documentation techniques.* ***Result:*** *This can be seen from the data on land assets in the Pati Regency area, there are still many that have not been certified.* ***Conclusion:*** *Based on the results of this study, the optimization of the acceleration of regional asset land certification in BPKAD Pati Regency has not run optimally, problems that occur in the completeness of regional asset land documents are an obstacle in the effectiveness and efficiency of implementing activities. The author recommends that BPKAD add employees in the asset sector and add operational infrastructure so that the implementation of the certification program can run effectively, as well as improve coordination with related OPDs to complete the documents needed to accelerate regional asset land certification.*

***Keywords:*** *Optimization, Regional Asset Land Certification, Financial Statement Opinion, Covid-19 Pandemic*

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati melakukan pengamanan hukum aset tetap tanah dalam bentuk pensertifikatan tanah aset daerah dalam rangka pengelolaan BMD. Permasalahan penelitian ini adalah pencatatan di buku inventaris belum sesuai yang terdapat di lapangan dan masih terdapat kasus aset tetap tanah dengan pihak ketiga. Hal ini dilihat melalui data tanah aset daerah Kabupaten Pati masih banyak yang belum bersertifikat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Optimalisasi Percepatan Pensertifikatan Tanah Aset Daerah Dalam Meraih Opini Laporan Keuangan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer serta data sekunder, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Data tanah aset daerah Kabupaten Pati masih banyak yang belum bersertifikat. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil penelitian ini, optimalisasi percepatan pensertifikatan tanah aset daerah di BPKAD Kabupaten Pati belum berjalan dengan optimal, masalah yang terjadi pada kelengkapan dokumen tanah aset daerah menjadi penghambat dalam efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Penulis merekomendasikan agar BPKAD menambah pegawai pada bidang aset dan menambah sarana prasarana operasional agar pelaksanaan program pensertifikatan dapat berjalan dengan efektif, serta meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait untuk melengkapi dokumen yang diperlukan dalam percepatan pensertifikatan tanah aset daerah.

**Kata kunci:** Optimalisasi, Pensertifikatan Tanah Aset Daerah, Opini Laporan Keuangan, Pandemi Covid-19

1. **PENDAHULUAN**
   1. **Latar Belakang**

Pengelolaan keuangan daerah mencakup beberapa kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah. Dalam tahap pelaporan ini dimaksudkan sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah dalam rangka menjalankan otonomi daerah. Laporan keuangan daerah akan diperiksa oleh BPK yang kemudian akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan tersebut. Berikut opini yang diberikan BPK kepada pemerintah daerah kabupaten Pati atas laporan keuangan daerah.

**Tabel 1.**

**Data Perolehan Opini Kabupaten Pati Tahun 2016-2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun** | **Perolehan Opini** |
| 1. | 2016 | WTP |
| 2. | 2017 | WTP |
| 3. | 2018 | WTP |
| 4. | 2019 | WTP |
| 5. | 2020 | WTP |

*Sumber: Hasil pengelolaan data riset 2021*

Pemerintah daerah kabupaten Pati mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK selama lima tahun berturut-turut. Data ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Pati telah mampu mendapat predikat terbaik mengenai pengelolaan keuangan daerahnya. Namun masih terdapat kelemahan pada Sistem Pengendalian Intern terutama dalam pengelolaan aset daerah. Tujuan pengelolaan barang milik daerah/aset adalah menunjang dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan pembangunan pemerintahan daerah, mewujudkan akuntabilitas, ketertiban, efektif, efisien, dan ekonomis dalam pengelolaan barang milik daerah/aset.

**Tabel 2.**

**Daftar Aset Tetap Daerah Kabupaten PatiPer 31 Desember 2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Aset** | **Jenis Aset** | **Saldo pada akhir tahun 2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Aset Tetap | Tanah | 3.259.811.944.117,00 |
| 2 | Aset Tetap | Peralatan dan Mesin | 815.180.092.278,90 |
| 3 | Aset Tetap | Bangunan dan Gedung | 1.289.390.781.347,89 |
| 4 | Aset Tetap | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 1.792.375.511.712,75 |
| 5 | Aset Tetap | Aset Tetap Lainnya | 110.599.074.748,17 |
| 6 | Aset Tetap | KDP | 24.188.862.694,00 |
|  | Jumlah |  | 7.291.546.266.898,70 |

*Sumber: Hasil pengelolaan data riset 2021*

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa aset tetap tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Pati pada tahun 2020 yang tercatat pada neraca adalah 3.259.811.944.117,00. Diperlukan pengamanan asset tetap tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Pati guna mecegah hilangnya hak milik daerah berupa tanah tersebut. Berikut format rekapitulasi sertifikat tanah kabupaten Pati.

**Tabel 3.**

**Format Rekapitulasi Sertifikat Aset Tanah Kabupaten Pati Tahun 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tanah** | | | |
| **Total Aset**  **Tanah** | **Sudah Bersertifikat** | **Belum Bersertifikat** | **Persentase**  **Yang Belum Bersertifikat** |
| 1. | 2.654 | 685 | 1.969 | 74,19 % |

*Sumber: Hasil pengelolaan data riset 2021*

Data di atas menunjukkan bahwa aset tanah daerah kabupaten Pati banyak yang belum memiliki sertifikat, oleh karena itu dibutuhkan pengamanan aset tanah daerah tersebut. Pengamanan merupakan salah satu tahapan dari pengelolaan aset daerah. Pandemi covid-19 pada tahun 2021 belum berhenti bahkan mengalami kenaikan pada bulan Juli. Dengan dikeluarkan Peraturan Bupati Pati tentang Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Pati, maka kegiatan inventarisasi barang milik daerah tentu akan mengalami kendala. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah kabupaten Pati untuk tetap melaksanakan kegiatan pelayanan barang milik daerah.

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap tanah pada pemerintah Kabupaten Pati di masa pandemi covid-19 mengalami hambatan. Hal ini menjadi sangat penting untuk diteliti, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul “Optimalisasi Percepatan Pensertifikatan Tanah Aset Daerah Dalam Meraih Opini Laporan Keuangan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah”**.**

* 1. **Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati menunjukkan bahwa aset tanah daerah kabupaten Pati banyak yang belum memiliki sertifikat, oleh karena itu dibutuhkan pengamanan aset tanah daerah tersebut. Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa pengamanan dalam pengelolaan aset daerah kabupaten Pati masih belum berjalan dengan optimal. Beberapa alasan yang mendasari hal tersebut yaitu pencatatan di buku inventaris belum sesuai yang terdapat di lapangan, masih terdapat kasus aset tetap tanah dengan pihak ketiga, dan aset tetap tanah di kabupaten Pati banyak yang belum memiliki sertifikat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah optimalisasi percepatan pensertifikatan tanah aset daerah dalam meraih opini laporan keuangan pada masa pandemi covid-19 serta faktor apa yang menjadi penghambat dalam optimalisasi percepatan pensertifikatan tanah aset daerah dalam meraih opini laporan keuangan pada masa pandemi covid-19 dan upaya apa yang dapat dilakukan guna mengatasi permasalahan tersebut.

* 1. **Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Brian pada tahun 2014 program pelaksanaan persertifikatan tanah aset pemerintah daerah belum berjalan secara efektif sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengatasinya (Brian Baskara, 2014). Peneliti Romlah yang berjudul Pengelolaan aset daerah atas tanah milik pemerintah daerah kabupaten pelalawan tahun 2015-2016 menemukan bahwa pengelolaan aset daerah atas anah milik pemerintah daerah kabupaten pelalawan tahun 205-2016 belum terlaksana dengan baik dikarenakan terdapat beberapa hambatan-hambatan (Romlah, 2018). Penelitian Hany yang berjudul program percepatan sertifikasi tanah untuk pengamanan aset wakaf, menemukan bahwa hal yang menjadihambatan dalam program ini adalah faktor biaya namun kementrian agama kota batu sudah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut (Hany Saidah, 2019). Penelitian Isharijadi dkk pada tahun 2019 yang berjudul Pengamanan Barang Milik Daerah Dalam Mewujudkan Akuntabilitas di BPKAD Kota Madiun menemukan bahwa pengamanan Barang Milik Daerah di BPKAD Kota Madiun sudah dilaksanakan dengan efektif namun dinilai belum akuntabel (Isharijadi dkk, 2019). Berdasarkan hasil penelitian Arif tentang Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Provinsi Riau menemukan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau belum berjalan secara optimal (Arif, 2020).

* 1. **Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yakni yang diteliti sekarang adalah opini laporan keuangan, Pada penelitian oleh Arif Kurnia Rahman fokus penelitiannya yaitu pengelolaan barang milik daerah sedangkan pada penelitian saat ini fokus penelitiannya adalah pengamanan pada sertifikat tanah aset daerah dengan menggunakan teori optimalisasi dengan analisis berdasarkan faktor input, output, outcome, dan impact.

* 1. **Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Optimalisasi Percepatan Pensertifikatan Tanah Aset Daerah Dalam Meraih Opini Laporan Keuangan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah.

1. **METODE**

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dimana arahan maupun gambaran dengan nyata tentang fakta-fakta serta keadaan yang sesungguhnya tentang Optimalisasi Percepatan Pensertifikatan Tanah Aset Daerah Dalam Meraih Opini Laporan Keuangan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya peneliti mengumpulkan, mengklasifikasikan serta menganalisis data yang berkaitan terhadap masalah yang dihadapi dilapangan serta membandingkan pengetahuan teknis terhadap keadaan yang sesungguhnya guna dapat di tarik suatu kesimpulan. Dengan fokus penelitian mengenai Optimalisasi Percepatan Pensertifikatan Tanah Aset Daerah menggunakan teori optimalisasi menurut Mardiasmo (Mardiasmo, 2018), dengan dimensi Pencapaian Input (Masukan), Pencapaian Output (Keluaran), Pencapaian Outcome (Hasil) dan Pencapaian Impact (Dampak).

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian yang dilakukan secara perspektif teoritis ialah teori Mardiasmo (2018:112), yang mengemukakan bahwa optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan jika dipandang dari sudut usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki secara efektif dan efisien yang mencakup input, output, outcome, dan impact. Adapun hasil analisis tersebut adalah:

**3.1 Pencapaian Input**

Pencapaian input dalam optimalisasi percepatan pensertifikatan tanah aset daerah ini dalam bentuk jumlah tanah aset daerah yang bersertifikat dan belum bersertifikatditunjukkan pada tabel 4.

**Tabel 4.**

**Data Tanah Aset Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jumlah Tanah Aset Daerah** | | | |
| **Total Aset Tanah** | **Sudah Bersertifikat** | **Belum bersertifikat** | **Persentase Yang Belum Bersertifikat** |
| 2.865 | 1.363 | 1.502 | 52,43 % |

*Sumber: Hasil pengelolaan data riset 2021*

Dari tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa tanah aset daerah Kabupaten Pati secara keseluruhan yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten Pati pada tahun 2021 adalah 2.865 bidang, yang dimana dari jumlah tersebut hanya 1.363 bidang yang sudah bersertifikat dan 1.502 yang belum bersertifikat. Data tersebut menunjukkan bahwa 52,4 % tanah aset daerah di kabupaten Pati belum memiliki sertifikat. Berdasarkan data yang diperoleh hampir setengah dari jumlah tanah aset daerah milik pemerintah kabupaten Pati belum bersertifikat dan tidak tercapainya target penyelesaian aset tanah daerah yang bermasalah terdapat pada kesalahan sumber daya manusia dalam mengidentifikasi, mencatat dan mengelola tanah aset daerah tersebut.

**3.2 Pencapaian Output**

Pencapaian input menghasilkan output dalam suatu kegiatan atau proses input. Dalam optimalisasi ini, pencapaian output yang dihasilkan dari proses percepatan pensertifikatan tanah aset daerah kabupaten Pati adalah hasil tanah aset daerah yang telah disertifikatkan oleh pemerintah daerah.

**Tabel 5.**

**Rekapitulasi Data Tanah Aset Daerah Kabupaten Pati Yang Sudah Bersertifikat Tahun 2021**

*Sumber: Hasil pengelolaan data riset 2021*

Tabel 5 menunjukan bahwa jumlah tanah aset daerah Kabupaten Pati yang sudah bersertifikat adalah 1.363 bidang tanah. Pada data tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Pati yang memiliki paling banyak tanah aset daerah yang sudah bersertifikat.

**3.3 Pencapaian Outcome**

Pencapaian outcome dalam penelitian ini adalah hasil atau dampak dari percepatan pensertifikatan tanah aset daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati. Dalam hal meraih opini laporan keuangan pensertifikatan tanah aset daerah tentu akan sangat berpengaruh dikarenakan pensertifikatan tanah aset daerah merupakan salah satu aspek yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Berikut data opini laporan keuangan yang diperoleh pemerintah daerah Kabupaten Pati.

**Tabel 6.**

**Data Perolehan Opini Pemerintah Daerah Kabupaten Pati**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Tahun** | **Perolehan Opini** |
| 1. | 2016 | WTP |
| 2. | 2017 | WTP |
| 3. | 2018 | WTP |
| 4. | 2019 | WTP |
| 5. | 2020 | WTP |
| 6. | 2021 | WTP |

*Sumber: Hasil pengelolaan data riset 2021*

Data di atas, menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Pati telah maraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima kali berturut-turut maka dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati telah baik dalam melaksanakan pengamanan tanah aset daerah khususnya dalam percepatan pensertifikatan tanah aset daerah. Pengamanan barang milik daerah berupa pensertifikatan tanah aset daerah ini juga berdampak pada aspek administrasi, pengelolaan tanah aset daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan dengan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) yang sudah ditetapkan.

**3.4 Pencapaian Impact**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati telah berupaya dalam melakukan percepatan persertifikatan aset tanah daerah yang bermasalah dan yang menjadi masalah dalam persertifikatan aset daerah masyarakat adalah asal usul aset tanah daerah yang hanya mengandalkan cerita masyarakat atau sejarah yang tidak tentu kepastiannya, sehingga hal ini dapat menghambat identifikasi dalam melegalitaskan aset tanah daerah tersebut apakah benar milik pemerintah daerah, provinsi, pusat atau pihak lainnya.

Namun Pemerintah Daerah secara maksimal telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan hal tersebut, mengingat besaran impact yang akan diberikan terhadap kehidupan masyarakat maupun bagi pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Jawa Tengah kedepannya. Pemerintah Kabupaten Pati telah mengambil langkah untuk memberikan stimulus pada permasalahan aset tanah daerah yang masih bermasalah terkait legalitasnya. Legalitas persertifikatan aset tanah daerah sangatlah penting, hal ini dilakukan agar pengelolaan asset tanah daerah teratur dan bisa dimanfaatkan dibawah kewenangan kepada bagian dari Pemerintah Daerah yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pati Jawa Tengah.

**Tabel 7.**

**Data Pemanfaatan Tanah Aset Daerah Kabupaten Pati**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenis Pemanfaatan** | **Jumlah Bidang** |
| 1. | Sewa Tanah | 58 |
| 2. | Kerjasama Pemanfaatan | 24 |
| Jumlah | | 82 |

*Sumber: Hasil pengelolaan data riset 2021*

Berdasarkan data diatas pemerintah daerah Kabupaten Pati telah berupaya mengelola tanah aset daerah dalam bentuk pemanfaatan tanah. Hal ini tentu menjadi sebuah keuntungan bagi pemerintah daerah dalam menambah jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten Pati. Pemanfaatan tanah aset daerah sering dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun perorangan. Untuk meminimalisir penyalahgunaan tanah aset daerah milik pemerintah daerah kabupaten Pati biasanya disalahgunakan oleh masyarakat dengan menjadikan tanah tersebut sebagai jaminan hutang, menjual lepas tanah aset daerah tersebut, serta dapat dalam bentuk menggadaikan tanah aset daerah tersebut dalam jangka waktu yang lama.

Oleh karena itu sangat tepat langkah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati dalam menjalankan program percepatan pensertifikatan tanah aset daerah dalam rangka meminimalisir penyalahgunaan tanah aset daerah. Dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga ikut serta mendorong adanya program percepatan pensertifikatan tanah aset daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati, hal ini dilakukan supaya mengurangi potensi korupsi dalam bentuk penyalahgunaan aset daerah. Oleh karena itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati bekerjasama dengan pihak-pihak lain untuk melaksanakan program percepatan pensertifikatan tanah aset daerah yang ditargetkan semua tanah aset daerah kabupaten Pati dapat tersertifikatkan pada akkhir tahun 2022.

**3.5 Diskusi dan Temuan Utama Penelitian**

Optimalisasi Percepatan Pensertifikatan Tanah Aset Daerah Dalam Meraih Opini Laporan Keuangan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah pada dasarnya belum berjalan dengan baik dikarenakan beberapa permasalahan yang ada yang telah di carikan solusinya oleh pemerintah daerah untuk mengatasi masalah tersebut.

1. **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati, dengan melalui teknik pengumpulan data dan analisa maka penulis menarik kesimpulan bahwa optimalisasi percepatan pensertifikatan tanah aset daerah dalam meraih opini laporan keuangan pada masa pandemi covid-19 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati belum berjalan dengan baik dikarenakan terdapat beberapa hambatan diataranya yaitu dokumen atau data yang tercatat di dua tempat, tidak adanya dokumen yang dimiliki pemerintah daerah dan pelaksanaan pensertifikatan tanah aset daerah terhambat oleh pandemi covid-19. Berdasarkan beberapa hambatan-hambatan tersebut maka upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati untuk mengatasi hal tersebut dalam mengoptimalkan percepatan pensertifikatan tanah aset daerah dalam meraih opini laporan keuangan pada masa pandemi covid-19 adalah melakukan koordinasi dan langkah-langkah strategis dengan pemerintah provinsi, menelusuri dokumen-dokumen yang diperlukan untuk percepatan pensertifikatan tanah aset daerah dan melaksanakan prosedur percepatan pensertifikatan tanah aset daerah sesuai dengan protokol kesehatan.

**Ketebatasan Penelitian.** Penelitian ini hanya tebatas pada periode watu dan tebatas hanya di Kabupaten Pati di Provinsi Jawa Tengah.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Untuk penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan periode waktu yang lebih panjang misal 10 tahun, dan dapat menambahkan kabupatenkota untuk dijadikan sampel sehingga penelitian akan lebih valid.

1. **UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih terutama diajukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Adhimursandi, Doddy. Optimalisasi Manufacturing Cycle Effectivieness (MCE) Terhadap Pengelolaan Value Added Activities Dan Non Value Added Activities Dalam Meningkatkan Efisiensi Produksi

Baskara, Brian. 2014. Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Aset Daerah Yang Belum Atas Nama Pemerintah Kabupaten Jombang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2009 Pasal 29 Ayat (1)2014

<https://jatengprov.go.id>

Limbong, Nike Ima Elia. 2016. Manajemen Aset Daerah Kota Pekanbaru

Maulidiah, Sri. 2017. Optimalisasi Pengelolaan Aset Sebagai Wujud Reformasi Birokrasi Di Daerah. 3

Mardiasmo. 2018. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Terbaru. Yogyakarta : Andi

Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Rahman, Abdul dkk. 2021.*Covid-19 : Seribu Satu Wajah* Yayasan Kita Menulis

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. CV Alfabeta

———. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* Bandung. Penerbit Alfabeta

Suharsaputra, Uhar. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*. Bandung. PT. Refika Aditama

Suwanda, Dadang. 2013. *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda*, 3rd edn Jakarta Pusat. Penerbit PPM

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah